



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KARAWANG

**Nabila Nazarina Putri Koswara<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: [nabilanazarina80@gmail.com](mailto:nabilanazarina80@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena belum optimalnya pelaksanaan program, yang ditunjukkan oleh data Sistem Informasi Kampung Keluarga Berkualitas bahwa dari 309 Kampung Keluarga Berkualitas yang terbentuk, hanya 42 kampung atau sekitar 13,6% yang mencapai klasifikasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara terhadap tujuh informan yang terdiri dari aparatur dinas, pengelola Kampung Keluarga Berkualitas, dan masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi yang belum mendukung pencapaian seluruh indikator program. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta perbaikan tata kelola birokrasi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, program pemerintah, Kampung Keluarga Berkualitas, keluarga berencana

### **Abstract**

*The title of this undergraduate thesis research is "Implementation of Policies on the Quality Family Village Program at the Population Control and Family Planning Office in Karawang Regency." The problem addressed in this study is that there are still phenomena in Karawang Regency indicating that the implementation of the Quality Family Village Program faces various obstacles. Based on data from the Quality Family*

*Village Information System, out of a total of 309 Quality Family Villages that have been established in Karawang Regency, only 42 villages have successfully achieved the "Sustainable" classification. This means that only about 13.6% of all Quality Family Villages are able to develop optimally and meet all the indicators set by the National Population and Family Planning Board. This program is regulated under Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development and is further regulated by Presidential Instruction Number 3 of 2022 concerning the Optimization of the Implementation of Quality Family Villages. Based on this background, the purpose of this study is to determine how the implementation of policies on the Quality Family Village Program is carried out at the Population Control and Family Planning Office in Karawang Regency. The theory used by the researcher is George C. Edward III's theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through literature study and field study, which included observation, documentation, and interviews with seven informants consisting of officials from the Population Control and Family Planning Office of Karawang Regency, heads of Quality Family Villages, and members of the general public. Based on the analysis using George C. Edward III's theory, the implementation has not been optimal. This is evident from the fact that out of 309 Quality Family Villages formed in Karawang Regency, only 42 have achieved the "Sustainable" classification, meaning that only approximately 13.6% of the villages are able to develop optimally and fulfill all indicators set by the National Population and Family Planning Board.*

**Keywords:** *Implementation, government program, Quality Family Village Program*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024 (Saputri 2024). Kondisi geografis dan demografis tersebut memberikan peluang yang besar, namun sekaligus menghadirkan tantangan yang kompleks, khususnya dalam pengendalian jumlah penduduk, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga. Pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi disertai dengan distribusi penduduk yang tidak merata terus menjadi permasalahan utama pembangunan, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 50,35 juta jiwa pada Juni 2024, dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,13% (valmay.abert 2024). Besarnya jumlah penduduk tersebut berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial, di antaranya pengangguran dan kemiskinan. Data

menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat pada Februari 2025 mencapai 6,74% dengan jumlah pengangguran sekitar 1,81 juta orang (Ramadhiani 2022). Selain itu, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 masih berada pada angka 7,02% atau setara dengan 3,65 juta penduduk (BPS Jawa Barat, 2025).

Kabupaten Karawang, sebagai salah satu kawasan industri utama di Indonesia, mengalami perubahan dan dinamika kependudukan yang cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,57 juta jiwa dan proporsi penduduk usia produktif mencapai sekitar 66%, Karawang menjadi tujuan utama migrasi tenaga kerja sektor industri. Tingginya arus migrasi tersebut memicu perubahan struktur sosial masyarakat, meningkatnya kebutuhan terhadap layanan dasar, serta menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kependudukan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan Program Bangga Kencana, yang salah satu implementasinya diwujudkan melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Program ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung KB dirancang sebagai satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang berfungsi untuk mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara terpadu.

Namun demikian, pelaksanaan Program Kampung KB di Kabupaten Karawang belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan data Sistem Informasi Kampung KB, dari total 309 Kampung KB yang telah dibentuk, hanya 42 kampung atau sekitar 13,6% yang berhasil mencapai klasifikasi “Berkelanjutan”. Sebagian besar Kampung KB masih berada pada kategori Dasar dan Berkembang, yang mencerminkan masih lemahnya kualitas

pengelolaan, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan Program Kampung KB di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: bagaimana implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan dinamika sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui data kuantitatif semata. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan di implementasikan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana khususnya di kabupaten karawang Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan posisi, peran, dan keterlibatan langsung dalam proses pengimplementasian keluarga berkualitas Informan utama meliputi kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketua tim pengendalian penduduk, advokasi dan data informasi, ketua kampung keluarga berkualitas dan masyarakat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif, baik dari sisi pengimplementasian kebijakan, pelaksana strategi, maupun aktor di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk membangun kerangka teoretis melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang undangan, serta dokumen resmi. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-

terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait strategi pengimplementasian kebijakan, serta hambatan dan dukungan yang dihadapi. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memverifikasi temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, member checking, serta penyusunan deskripsi yang kaya dan kontekstual. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai Implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berkualitas (KB) pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten karawang

## **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang. maka peneliti menggunakan Teori Menurut George C. Edward III mencakup 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

### **1. Komunikasi**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang pada dasarnya telah berlangsung secara sistematis dan bertahap. Pada level internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), penyampaian kebijakan dilakukan melalui mekanisme komunikasi formal dan terstruktur, seperti rapat dinas, sehingga setiap unit kerja memiliki pemahaman yang relatif seragam mengenai arah kebijakan, sasaran program, serta tahapan implementasi. Pola komunikasi internal tersebut berperan dalam menjaga konsistensi kebijakan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Pada tataran pelaksana, DPPKB memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi, melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis, pemanfaatan grup komunikasi digital, serta media sosial. Strategi komunikasi yang menggunakan berbagai saluran ini memungkinkan penyebaran informasi berjalan lebih cepat dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Namun demikian, tingkat efektivitas komunikasi belum sepenuhnya merata antar klasifikasi Kampung KB. Kampung KB dengan klasifikasi dasar masih mengalami keterbatasan pemahaman, khususnya terkait aspek teknis dan administrasi, sehingga membutuhkan intensifikasi komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Sebaliknya, Kampung KB dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik, tercermin dari kemampuan pengurus dalam menerima, menginterpretasikan, serta mengimplementasikan informasi kebijakan secara mandiri.

Di tingkat masyarakat, pemahaman terhadap Program Kampung Keluarga Berkualitas diperoleh melalui peran kader, aktivitas kemasyarakatan, serta pemanfaatan media sosial kampung. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terinternalisasi melalui interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, komunikasi telah berkontribusi positif terhadap implementasi kebijakan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Perbedaan tingkat pemahaman antar klasifikasi Kampung KB menegaskan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan, terutama bagi Kampung KB dengan kapasitas awal yang masih terbatas.

## **2. Sumber Daya**

Aspek sumber daya merupakan elemen yang sangat menentukan dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan sumber daya secara kelembagaan telah dirancang secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Namun demikian, keterbatasan baik dari segi jumlah

maupun kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, khususnya pada unit teknis yang bertanggung jawab dalam pengendalian penduduk dan pendampingan Kampung KB.

Jumlah pelaksana yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya Kampung KB yang harus didampingi, sehingga kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi belum dapat dilakukan secara optimal dan merata. Kondisi ini berdampak pada perbedaan kualitas implementasi program di berbagai wilayah. Di tingkat desa, kapasitas sumber daya manusia juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan sesuai dengan klasifikasi Kampung KB. Kampung KB dengan klasifikasi dasar masih menghadapi keterbatasan tenaga penggerak, minimnya regenerasi kader, serta rendahnya keterlibatan kelompok usia produktif, yang menyebabkan pelaksanaan program berjalan kurang dinamis. Kampung KB klasifikasi berkembang menunjukkan kondisi sumber daya manusia yang relatif lebih baik, meskipun masih memerlukan peningkatan kompetensi, terutama dalam pengelolaan data dan administrasi berbasis digital.

Sebaliknya, Kampung KB dengan klasifikasi mandiri dan berkelanjutan telah didukung oleh sumber daya manusia yang lebih kompeten dan adaptif, sehingga mampu melaksanakan program secara lebih mandiri. Pada klasifikasi ini, kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak dan inovator kegiatan. Meskipun infrastruktur sistem informasi Kampung KB telah tersedia dan berfungsi dengan baik, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoptimalkan pemanfaatannya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antar unsur sumber daya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan.

### **3. Disposisi**

Hasil penelitian pada dimensi disposisi menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap efektivitas implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas. Pada tingkat kabupaten, aparat DPPKB secara umum menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, serta evaluasi. Namun, banyaknya tugas dan tanggung jawab yang bersifat multiperan menyebabkan perhatian terhadap Program Kampung KB belum dapat diberikan secara optimal dan merata.

Di tingkat desa, disposisi pelaksana memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antar klasifikasi Kampung KB. Kampung KB klasifikasi dasar masih dihadapkan pada rendahnya motivasi dan rasa tanggung jawab pengurus, yang berdampak pada kurangnya kesinambungan kegiatan serta minimnya inovasi program. Kampung KB klasifikasi berkembang menunjukkan kecenderungan disposisi yang lebih positif, meskipun konsistensi dalam pelaksanaan program masih perlu diperkuat. Sementara itu, Kampung KB klasifikasi mandiri dan berkelanjutan menampilkan disposisi pelaksana yang sangat baik, ditunjukkan oleh tingginya inisiatif, kuatnya rasa tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat yang relatif stabil dan berkesinambungan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa disposisi pelaksana berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan lokal serta kekuatan hubungan sosial dalam komunitas. Kampung KB yang didukung oleh disposisi pelaksana yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, sedangkan lemahnya motivasi dan komitmen dapat menjadi penghambat meskipun dukungan teknis dan sumber daya telah tersedia.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang pada prinsipnya telah dirancang dengan cukup jelas melalui keberadaan standar operasional prosedur, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi di tingkat dinas. Struktur kelembagaan tersebut secara formal telah mampu mendukung proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan program. Namun demikian, efektivitas struktur birokrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara merata pada tingkat pelaksana di desa.

Kampung KB dengan klasifikasi dasar masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi yang belum terjadwal secara rutin, keterbatasan kemampuan administrasi kader, serta minimnya sarana pendukung, sehingga pelaporan dan pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Kampung KB klasifikasi berkembang menunjukkan adanya perbaikan dalam hal koordinasi dan pengelolaan administrasi, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis tertentu. Sebaliknya, Kampung KB klasifikasi mandiri dan berkelanjutan telah memiliki struktur birokrasi yang lebih mapan, ditandai dengan koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis serta pengelolaan administrasi berbasis digital yang tertib dan tepat waktu.

Dari sudut pandang masyarakat, struktur birokrasi dinilai cukup mendukung pelaksanaan program, meskipun tingkat keterlibatan warga masih bervariasi. Secara keseluruhan, struktur birokrasi telah menyediakan kerangka kerja yang memadai bagi implementasi kebijakan, namun masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur administrasi, serta pemerataan penyediaan fasilitas pendukung agar pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat berlangsung lebih efektif dan merata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan program. Meskipun Program Kampung KB telah dibentuk dan dilaksanakan di berbagai kecamatan dan desa, sebagian besar Kampung KB masih berada pada klasifikasi dasar dan berkembang, sehingga belum mampu memenuhi seluruh indikator dan persyaratan menuju klasifikasi berkelanjutan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kelemahan, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi pelaksana maupun dari faktor eksternal lingkungan kebijakan. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga berbagai permasalahan di lapangan belum tertangani secara optimal. Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap tujuan dan manfaat Program Kampung Keluarga Berkualitas juga masih perlu ditingkatkan agar keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, meskipun implementasi kebijakan Program Kampung KB di Kabupaten Karawang telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, diperlukan upaya penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, pemerataan dukungan sarana dan prasarana, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar program dapat berkembang secara lebih efektif, berdaya guna, dan berkelanjutan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ramadhiani, Eveline. 2022. *Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA Delas)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60203>.
- Saputri. 2024. *Jumlah Penduduk Indonesia 2024 Tembus 281,6 Juta Jiwa*. Jumlah Penduduk Indonesia 2024 Tembus 281,6 Juta Jiwa.
- valmay.abert. 2024. *Jawa Barat Jadi Provinsi Dengan Penduduk Terbanyak 2024*. <https://data.goodstats.id/statistic/jawa-barat-jadi-provinsi-dengan-penduduk-terbanyak-2024-ulqWO>.

